

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tantangan utama dalam sistem demokrasi adalah menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip *checks and balances* seharusnya menjadi fondasi untuk mencegah dominasi berlebihan dari satu lembaga. Namun, ketika keseimbangan tersebut terganggu, demokrasi dapat bergeser ke arah sistem yang otoriter dan represif, di mana kebebasan politik rakyat terancam dan partisipasi masyarakat dibatasi. Fenomena pemusatan kekuasaan semacam ini bukan hanya menjadi perhatian dalam teori politik, tetapi juga realitas yang dialami banyak negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks Indonesia masa kini, sejumlah indikator menunjukkan adanya gejala kemunduran kualitas demokrasi. Dalam laporan tahunan Freedom House, skor kebebasan Indonesia menurun dari 62 pada tahun 2020 menjadi 59 pada tahun 2023, menempatkan Indonesia dalam kategori negara “partly free”¹. Hal ini diperkuat oleh data Indeks Demokrasi dari The Economist Intelligence Unit (2023), yang menempatkan Indonesia dalam kategori *flawed democracy* dengan skor 6,71 dari 10². Klasifikasi ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam proses politik, budaya demokrasi, serta efektivitas fungsi lembaga pemerintahan. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan yang semestinya dihindari justru kembali menjadi isu aktual dalam kehidupan politik Indonesia.

Gejala tersebut juga tercermin dalam fenomena sosial belakangan ini, misalnya polemik pengibaran bendera bajak laut One Piece oleh sejumlah

¹ Freedom House. (2023). *Freedom in the World 2023: Indonesia*. Retrieved from <https://freedomhouse.org/> diakses pada 1 Juli 2025 pukul 08.40 WIB

² The Economist Intelligence Unit. (2023). *Democracy Index 2023*. Retrieved from <https://eiu.com/> diakses pada 1 Juli 2025 pukul 09.20 WIB

kalangan muda dan komunitas sopir truk menjelang peringatan HUT ke-80 RI.³ Sebagian pemerintah menilai tindakan ini sebagai bentuk provokasi, bahkan ada yang mengaitkannya dengan upaya “kudeta” dan ancaman terhadap persatuan bangsa. Namun, bagi sebagian masyarakat dan akademisi, fenomena ini justru dibaca sebagai ekspresi kebebasan berpendapat dan respon terhadap ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara, baik dari sisi ekonomi maupun demokrasi. Dengan menggunakan simbol budaya populer, pengibaran bendera ini mencerminkan keresahan publik terhadap praktik kekuasaan yang dianggap tidak adil, represif, dan gagal menjawab kebutuhan rakyat.

Kecenderungan ini memiliki kemiripan dengan pola kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966) di bawah kepemimpinan Soekarno. Pada periode tersebut, kekuasaan negara terpusat pada figur presiden, yang berdampak pada terpinggirkannya peran lembaga legislatif dan yudikatif. Kondisi itu membuka jalan bagi terbentuknya sistem politik yang sarat dengan represi terhadap kebebasan rakyat dan kontrol ideologis negara. Dengan melihat adanya kemiripan pola antara situasi demokrasi saat ini dan masa Demokrasi Terpimpin, maka kajian historis terhadap kritik para tokoh bangsa menjadi sangat penting untuk menghadirkan perspektif reflektif bagi demokrasi kontemporer Indonesia.

Dalam hal ini, pemikiran Mohammad Hatta dan Hamka menempati posisi penting. Keduanya secara konsisten menyuarakan kritik terhadap pemusatan kekuasaan yang cenderung mengarah pada otoritarianisme. Pemikiran mereka tidak hanya relevan bagi konteks masa lalu, tetapi juga memberikan kontribusi dalam membaca dan memahami dinamika demokrasi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, mengkaji kritik Hatta dan Hamka terhadap praktik kekuasaan dalam Demokrasi Terpimpin merupakan upaya yang signifikan, baik secara akademik maupun praktis, untuk menjaga arah demokrasi Indonesia agar tetap sejalan dengan prinsip kebebasan dan partisipasi rakyat.

³ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8040741/bendera-one-piece-berkibar-jelang-hut-ke-80-ri-simbol-kritik-atau-ancaman> diakses pada 23 Agustus 2025 pukul 20.07 WIB

Sebelumnya, pada tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dimana presiden hanya berperan sebagai kepala negara sementara kekuasaan eksekutif berada ditangan perdana menteri. Sistem demokrasi parlementer pada periode 1950-1959 dianggap tidak efektif karena seringnya pergantian kabinet yang mengakibatkan instabilitas politik dan menghambat jalannya pemerintahan secara optimal.⁴

Situasi tersebut mendorong munculnya pemikiran untuk kembali menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Menanggapi kebuntuan politik nasional, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara.⁵ Dengan kembalinya UUD 1945, sistem pemerintahan mengalami perubahan besar, ditandai dengan lahirnya Demokrasi Terpimpin, sebuah konsep yang menitikberatkan pada peran presiden dalam mengambil keputusan.⁶ Sistem ini membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan, di mana kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno, sementara peran parlemen dan lembaga demokratis lainnya semakin dilemahkan.

Demokrasi Terpimpin yang diusung Soekarno bertujuan untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang terjadi selama periode Demokrasi Parlementer. Namun, sistem ini justru menyebabkan pemusatan kekuasaan dan otoritarianisme yang semakin kuat, dimana Soekarno mengambil kendali penuh atas pemerintahan, militer, dan kebijakan ekonomi. Parlemen hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan presiden, sementara oposisi politik semakin ditekan. Di sisi lain, Konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang digagas oleh Soekarno bertujuan menyatukan kekuatan politik nasional. Namun, gagasan ini memicu polemik, terutama dari kalangan

⁴Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Cornell University Press, 1962) h. 102

⁵ Budi Septiyono, *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965* (Yogyakarta: Ombak, 2005) h. 47

⁶ Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959* (Cornell Modern Indonesia Project, 1966) h. 89

Islam dan intelektual yang menolak dominasi Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan.

Di ranah politik domestik, kekuasaan Soekarno semakin terpusat seiring dengan diberlakukannya berbagai kebijakan represif. Pembatasan kebebasan pers dan penindasan terhadap partai politik oposisi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga stabilitas nasional. Langkah-langkah tersebut, meskipun diklaim sebagai upaya untuk menghindari konflik horizontal, justru menimbulkan kritik keras dari kalangan akademisi dan aktivis politik yang melihatnya sebagai bentuk otoritarianisme yang mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.⁷

Di sektor ekonomi, kebijakan pembangunan yang diusung oleh pemerintahan Orde Lama cenderung menitikberatkan pada proyek-proyek besar yang mengorbankan pemerataan kesejahteraan. Dominasi perencanaan ekonomi terpusat menyebabkan ketimpangan yang signifikan antara daerah dan pusat, serta antara kalangan elit dan rakyat kecil. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ekonomi ini akhirnya turut melemahkan legitimasi pemerintahan di mata publik.⁸

Selain itu, konsep Nasakom yang dicetuskan oleh Soekarno semakin memperkuat dominasi negara dalam aspek kehidupan. Bagi sebagian pihak, konsep ini dianggap sebagai strategi politik untuk menyatukan berbagai elemen bangsa. Namun, bagi sebagian lainnya, terutama dari kalangan Islam dan kelompok nasionalis konservatif, Nasakom dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan politik dan ideologi yang telah lama dibangun.⁹

Fokus penelitian ini pada periode 1959-1966 didasarkan pada fakta bahwa era ini merupakan puncak otoritarianisme Soekarno, di mana kebebasan berpendapat semakin dibatasi, peran parlemen dilemahkan, dan sistem ekonomi mengalami krisis. Kritik Mohammad Hatta dan Hamka juga semakin tajam pada periode ini, terutama setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli

⁷ Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959* (Cornell Modern Indonesia Project, 1966 h. 89

⁸ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Pustaka LP3ES, 1987), h. 314

⁹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Pustaka LP3ES, 1987) h. 314

1959 yang menghapus sistem Demokrasi Parlementer dan menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin. Oleh karena itu, rentang waktu ini dipilih untuk melihat bagaimana kedua tokoh ini merespons langsung kebijakan Soekarno dalam masa tersebut.

Pemilihan Mohammad Hatta dan Hamka sebagai objek penelitian ini bukan tanpa alasan. Keduanya merupakan tokoh yang memiliki latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda, namun sama-sama menjadi kritikus utama terhadap Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Keduanya sepakat bahwa kebijakan Soekarno membawa konsekuensi negatif bagi negara. Kritik-kritik tersebut tidak hanya mencerminkan pandangan personal mereka, tetapi juga menggambarkan ketegangan ideologis dalam perjalanan sejarah bangsa.

Mohammad Hatta, sebagai salah satu proklamator Indonesia, memberikan kritik dari perspektif sistem politik dan ekonomi (prinsip demokrasi dan ekonomi kerakyatan). Hatta menilai Demokrasi Terpimpin sebagai bentuk penyimpangan dari demokrasi parlementer yang ia perjuangkan sejak awal kemerdekaan. Dalam esainya yang terkenal, "Demokrasi Kita" tahun 1960, Ia berpendapat bahwa sistem ini menghilangkan mekanisme *check and balance* dan berpotensi menimbulkan kekuasaan absolut di tangan seorang pemimpin.¹⁰

Hatta juga mengkritik pendekatan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi yang menurutnya lebih berorientasi pada pemodal besar daripada rakyat kecil. Sebagai solusi Hatta mendorong penerapan sistem koperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang sesuai nilai-nilai gotong royong masyarakat Indonesia. Selain itu, kebijakan ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh negara menyebabkan krisis keuangan, inflasi tinggi, dan semakin sulitnya kehidupan rakyat kecil. Hatta melihat bahwa sistem yang terlalu sentralistik ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang ia perjuangkan. Serangkaian kritik tersebut menyebabkan hubungan antara Hatta dan Soekarno semakin merenggang, hingga akhirnya Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956.

¹⁰ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* ((Jakarta: Panji Masyarakat, 1960) h. 45

Sementara itu, Hamka, seorang ulama, sastrawan dan pemikir Islam terkemuka, memandang bahwa pemerintah sering kali mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moralitas dalam menjalankan kekuasaan. Ia menekankan bahwa pembangunan bangsa harus berlandaskan pada prinsip keimanan dan akhlak. Dalam karya-karyanya, termasuk *Tafsir Al-Azhar* dan berbagai artikel di majalah *Panji Masyarakat*, Hamka secara tegas menolak konsep Nasakom yang diperkenalkan Soekarno karena Hamka menganggap komunisme bertentangan dengan ajaran Islam dan moralitas bangsa serta dianggap sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam.¹¹ Hamka juga mengkritik otoritarianisme dalam Demokrasi Terpimpin yang mengabaikan dan tidak menghormati prinsip musyawarah dan keadilan.¹² Selain itu, Hamka juga mengkritik pembatasan kebebasan pers dan tindakan represif terhadap organisasi Islam seperti Masyumi yang dibubarkan oleh pemerintah tahun 1960.

Hamka menyampaikan kritiknya melalui media, salah satunya adalah melalui Majalah *Panji Masyarakat* yang kerap menyuarakan aspirasi Islam dan menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan umat Islam.¹³ Akibat kritik-kritiknya, Hamka pernah ditahan pada tahun 1964 dengan tuduhan terlibat dalam gerakan anti pemerintah, meskipun kemudian dibebaskan tahun 1966 setelah rezim Soekarno jatuh.

Meskipun Hatta dan Hamka memiliki fokus kritik yang berbeda, keduanya memiliki benang merah yang sama, yaitu menolak sistem otoriter yang membatasi kebebasan rakyat. Kritik mereka bukan hanya sekadar perbedaan ideologi, tetapi juga merupakan perlawanan terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan bangsa. Hamka berjuang untuk kebebasan beragama dan peran Islam dalam politik, sedangkan Hatta berjuang untuk kebebasan demokrasi dan kesejahteraan rakyat dalam sistem ekonomi yang lebih adil. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pandangan dan kritik kedua

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982) h. 256

¹² Azyumardi Azra, *Islam, Reformasi, dan Demokrasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) h. 134

¹³ Majalah *Panji Masyarakat*, edisi Januari 1963

tokoh terhadap pemusatan kekuasaan dalam masa Demokrasi Terpimpin serta implikasinya terhadap kondisi politik dan sosial masyarakat Indonesia saat itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah utama yang ditonjolkan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan yang diberlakukan Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin dan bagaimana bentuk kritik yang disampaikan oleh Mohammad Hatta dan Hamka terhadap pemerintahan Soekarno selama masa Demokrasi Terpimpin. Kedua tokoh ini menanggapi tantangan zaman melalui jalur pemikiran dan tulisan yang kuat, namun dengan pendekatan yang berbeda. Hatta dengan pendekatan konstitusional dan demokratis sementara Hamka dengan gaya religius-moralistiknya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakter kritik kedua tokoh tersebut dalam kerangka *challenge and response*, serta mengungkap sejauh mana kritik itu mencerminkan perlawanan intelektual terhadap pemusatan kekuasaan dan penyimpangan demokrasi pada masa tersebut.

Kajian akademik yang secara khusus mengkaji dan membandingkan kritik kedua tokoh ini masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung membahas kritik Mohammad Hatta dan Hamka secara terpisah, dalam konteks Islam politik atau pemikiran demokrasi saja. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dan menghadirkan analisis komparatif terhadap pemikiran dua tokoh besar ini, khususnya dalam menanggapi pemusatan kekuasaan yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin.

Penelitian ini berusaha untuk menggabungkan dan membandingkan kedua perspektif tersebut dalam satu kajian yang lebih komprehensif. Dengan mengkomparasikan kritik Mohammad Hatta dan Hamka, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana dua tokoh dengan latar belakang berbeda memiliki kesamaan dalam menolak pemusatan kekuasaan Soekarno, serta bagaimana kritik mereka dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai dampak Demokrasi Terpimpin terhadap kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian yang

sudah ada, tetapi juga menawarkan sudut pandang baru dalam melihat perlawanan intelektual terhadap sistem otoriter di Indonesia.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin?
2. Bagaimana kritik Mohammad Hatta dan Hamka terhadap kekuasaan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin?

C.Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kebijakan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin
2. Untuk mengetahui bentuk kritik Mohammad Hatta dan Hamka terhadap kekuasaan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin.

D.Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki peran penting dalam penelitian sejarah, karena membantu menghindari plagiasi, memahami manfaat penelitian sebelumnya, serta menjadi pembanding dengan penelitian yang sedang dilakukan. Melalui tinjauan ini, penulis menemukan beberapa karya yang relevan dengan topik penelitian.

1. Kajian tentang Mohammad Hatta
 - a. Skripsi berjudul *Kiprah Mohammad Hatta dalam Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat tahun 1945-1966*. Penelitian ini dilakukan oleh Sinta Anggisa mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta serta peran aktifnya dalam memperjuangkan prinsip tersebut. Berbeda dengan penelitian ini, fokus penulis lebih tertuju pada kritik-kritik yang disampaikan Mohammad Hatta, khususnya terhadap praktik kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin.
 - b. Jurnal berjudul *Pemikiran dan Kritik Hatta Tentang Soekarno dalam buku Demokrasi Kita*. Jurnal ini ditulis oleh Nurul Nabila Putri dari Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Penelitiannya mengkaji

pemikiran dan kritik Hatta terhadap Soekarno sebagaimana tertuang dalam buku *Demokrasi Kita*. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi penulis tidak terbatas pada buku *Demokrasi Kita*, tetapi juga merujuk pada berbagai sumber primer lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh.

- c. Skripsi berjudul *Respon Mohammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959*. Skripsi ini ditulis oleh Erdin Rahman Taupik, mahasiswa Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati pada tahun 2019. Penelitiannya berfokus pada isi serta respons Mohammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi penulis tidak hanya membahas dekrit itu, tetapi juga menelaah lebih jauh bagaimana Soekarno menjalankan pemerintahan secara otoriter setelahnya.
- d. Skripsi berjudul *Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Politik Indonesia (1956-1965)*. Skripsi ini ditulis oleh Hadi Hartanto, mahasiswa Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini mengkaji dinamika hubungan antara Soekarno dan Mohammad Hatta sejak masa pergerakan nasional hingga keduanya berada dalam lingkup pemerintahan. Fokus utamanya adalah mengungkap situasi politik Indonesia antara 1956 hingga 1965 serta menelusuri akar perbedaan pandangan keduanya dan dampaknya terhadap kebijakan nasional. Berbeda dengan penelitian ini, skripsi penulis tidak hanya membahas relasi keduanya, tetapi menitikberatkan pada kritik Hatta terhadap pemerintahan Soekarno dan bagaimana Soekarno meresponsnya.

2. Kajian tentang Hamka

- a. Skripsi berjudul *Kritik Buya Hamka terhadap Pemerintah Orde Lama dari Tahun 1959 sampai Tahun 1966 dalam Tafsir Al-Azhar*. Penelitian yang dilakukan oleh Ariq Hidayat Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang Buya Hamka sebagai mufassir yang mengarang kitab Al-Azhar. Penelitian tersebut menyoroti

indikasi yang mengarahkan penafsiran Buya Hamka terhadap kritiknya terhadap pemerintahan Orde Lama, serta bentuk kritik yang disampaikan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis dalam kajian ini tidak hanya berfokus pada satu sumber primer seperti Tafsir Al-Azhar, tetapi juga melibatkan sejumlah sumber primer lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

- b. Skripsi berjudul *Kritik Majalah Panji Masyarakat terhadap Orde Lama masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)*. Studi yang dilakukan oleh Yeni Fathurohmah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021, bertujuan untuk menelaah latar belakang historis dan perkembangan Majalah Panji Masyarakat selama periode Demokrasi Terpimpin, serta mengevaluasi bentuk-bentuk kritik yang disampaikan media tersebut terhadap pemerintahan Orde Lama. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada peran Panji Masyarakat sebagai media yang aktif dalam menyuarakan nilai-nilai Islam, sekaligus merespons isu-isu aktual yang berkembang pada masa itu, termasuk dinamika pemerintahan di era Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang lebih menitikberatkan pada kritik tokoh terhadap pemusatan kekuasaan, bukan semata pada media yang digunakan.
- c. Skripsi berjudul *Buya Hamka dan Perannya dalam Dinamika Perpolitikan Republik Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Lama Tahun 1945-1966*. Penelitian ini dilakukan oleh Rendi Faisal Firdaus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara analitis dan mendeskripsikan kontribusi Buya Hamka dalam dinamika politik di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penulis karena penelitian ini lebih terfokus pada peran dari seorang Buya Hamka di masa Orde Lama, sementara penulis lebih fokus kepada kritik Buya Hamka terhadap pemerintahan Orde Lama.
- d. Jurnal berjudul *Penafsiran, Ideologi, dan Afiliasi Politik: Kritik Buya Hamka (1908-1981 M) terhadap Nasakom Era Demokrasi Terpimpin*

(1959-1966 M). Penelitian ini dilakukan oleh Akhmad Aidil Fitra dan Novizal Wendry dari UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024. Seperti yang dilakukan Buya Hamka, ia menjadikan tafsirnya untuk mengkritik ideologi politik Nasakom pada era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa Buya Hamka mengkritik Nasakom dalam tafsir Al-Azhar. Penelitian ini berbeda dengan penulis karena penulis dalam meneliti Buya Hamka tidak hanya terfokus kepada satu sumber primer yaitu tafsir Al-Azhar saja tetapi juga menggunakan sumber primer lainnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kritik Mohammad Hatta dan Buya Hamka secara terpisah. Misalnya, kritik Mohammad Hatta lebih sering dikaji dalam konteks gagasannya tentang demokrasi dan ekonomi kerakyatan. Sementara itu studi tentang kritik Buya Hamka terhadap Demokrasi Terpimpin lebih banyak membahas aspek keagamaan dan hubungannya dengan pembredelan Panji Masyarakat. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan bagaimana kedua tokoh ini mengkritik pemerintahan Orde Lama masa Demokrasi Terpimpin. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis kritik Hamka dan Hatta secara komparatif.

Perspektif baru yang ditawarkan adalah bagaimana kritik terhadap kekuasaan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin dapat dikaji secara lebih holistik melalui sudut pandang dua tokoh dari latar belakang yang berbeda. Beberapa aspek utama dalam perspektif baru ini meliputi:

1. Mengkombinasikan dua sudut pandang berbeda dalam satu analisis komparatif → Hamka sebagai pemikir Islam dan Hatta sebagai negarawan & ekonom, tetapi keduanya menolak otoritarianisme Soekarno.
2. Menunjukkan bahwa kritik terhadap Demokrasi Terpimpin tidak hanya berasal dari oposisi politik, tetapi juga dari intelektual dan tokoh agama yang memiliki dasar pemikiran yang berbeda.

3. Menawarkan pemahaman lebih luas tentang bagaimana kritik terhadap kekuasaan Soekarno memiliki dimensi keagamaan, politik, dan ekonomi secara bersamaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti perbedaan kritik mereka, tetapi juga mencari titik temu dan dampak dari kritik mereka terhadap dinamika politik Indonesia saat itu.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian sejarah digunakan untuk menelusuri, merekonstruksi, dan menganalisis peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang relevan, sedangkan pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman makna, pemikiran, dan kritik dua tokoh terhadap situasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin secara mendalam dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber primer, seperti esai Mohammad Hatta yaitu Demokrasi Kita, surat-surat kepada Soekarno dan karya Buya Hamka (Tafsir Al-Azhar, artikel di Majalah Panji Masyarakat) serta berbagai kutipan pidato Soekarno. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan kritik kedua tokoh terhadap kekuasaan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin.

Metode penelitian sejarah ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu heuristik (pencarian sumber), kritik, interpretasi, dan historiografi.¹⁴

1. Heuristik

Istilah "heuristik" berasal dari bahasa Yunani *heuristiken*, yang berarti menemukan atau mencari. Dalam konteks penelitian sejarah, heuristik merujuk pada tahap pengumpulan berbagai jenis sumber, seperti dokumen tertulis, kesaksian lisan, maupun fakta-fakta lain yang relevan, yang

¹⁴ Wulan J. Sukmana, *Metode Penelitian Sejarah*, Seri Publikasi Pembelajaran Vol 1 No 2 (2021), h. 2

bertujuan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah secara sistematis dan objektif.¹⁵

Penelitian ini memanfaatkan sumber primer yaitu karya dari Hatta dan Hamka seperti tulisan di Panji Masyarakat ataupun essay *Demokrasi Kita*. Beberapa arsip resmi dari Arsip Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta kompilasi pidato Soekarno yang membahas konsep Nasakom dan Manipol Usdek sebagai identitas negara. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk menganalisis kebijakan dan respons pemerintah terhadap kritik yang disampaikan oleh Hamka dan Mohammad Hatta.

Dalam penelitian sejarah, peneliti harus menekankan pada sumber yang didapatnya, sumber primer yang banyak dan akurat lebih memperkuat kredibilitas tulisan. Adapun sumber yang didapat oleh peneliti sebagai berikut :

a. Sumber Primer

1. Sumber Mohammad Hatta

- a) Essay *Demokrasi Kita* karya Mohammad Hatta tahun 1960
- b) Buku Mochtar Lubis *Hati Nurani Melawan Kezaliman: Surat-Surat Bung Hatta Kepada Presiden Soekarno 1957-1965* tahun 1988
- c) Buku *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*

2. Sumber Hamka

- a) *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka (ditulis di penjara 1964–1966)
- b) Buku *Kenang-Kenangan Hidup* karya Hamka tahun 1979
- c) Buku *Dari Hati ke Hati* karya Hamka tahun 2002 (Kumpulan tulisan Hamka dalam Panji Masyarakat pada rubrik Dari Hati ke Hati)

¹⁵ M. Dien Madjid and Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, Repository.UINjkt.Ac.Id, Cet I (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), h. 219.

3. Sumber Primer lainnya

- a) Majalah Panji Masyarakat, no.7 Edisi Tahun 1960. (1960).
“*Jakarta Raja dan Kegiatan-Kegiatan Politik*”. Jakarta: Jajasan Nurul Islam.
- b) Majalah Panji Masyarakat No. 9 tahun 1960.”*Demokrasi Kita*”,
(Jakarta: Jajasan Nurul Islam, 1960)
- c) Majalah Panji Masyarakat. Edisi Tahun 1960.”*Kepribadian Nasional*”.(1959). Jakarta: Jajasan Nurul Islam.
- d) Majalah Panji Masyarakat. Edisi Tahun 1967. (1967).”*Cara-Cara yang digunakan Soekarno untuk Mempertahankan Kekuasaannya*”. Jakarta: Jajasan Nurul Islam.
- e) Majalah Panji Masyarakat No.12 tahun 1967.”*Demokrasi Tegaklah, Tegaklah Engkau Kembali*. Jakarta: Jajasan Nurul Islam, 1967)
- f) Majalah Panji Masyarakat No.8 tahun 1967. “*Pelaksanaan the Rule of Law Menurut UUD dalam Rezim Orde Lama*”. Jakarta: Jajasan Nurul Islam.
- g) Majalah Panji Masyarakat. No. 12 tahun 1967 “ *Renungan Tentang Pancasila dan UUD 1945*” . (Jakarta: Jajasan Nurul Islam)
- h) Buku *Nasakom Adalah Benar*, Amanat Indoktrinasi PJM. Presiden Soekarno Pemimpin Besar Revolusi/Bapak Marhaenisme pada Pembukaan Kursus Kilat Kader Nasakom tanggal 1 Juni 1965
- i) Buku *Subur, Subur, Suburlah PKI*, Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Raksasa Ulang Tahun ke-45 PKI
- j) Buku *Penemuan Kembali Revolusi Kita*, Pidato Presiden Republik Indoensia pada tanggal 17 Agustus 1959
- k) Buku *Dibawah Bendera Revolusi*, berisi tulisan-tulisan dan pidato-pidato Soekarno
- l) Beberapa arsip seperti Tap MPRS/III/1963 dan Keppres yang dikeluarkan Soekarno (Seperti Keppres pembubaran Masyumi, GPII dan Pemberhentian Hatta sebagai Wakil Presiden)

b. Sumber Sekunder

1. Skripsi/Jurnal

a) Sinta, A. 2019. *Kiprah Mohammad Hatta dalam Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat tahun 1945-1966*. (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu: Bengkulu)

b) Rahman, E. 2019. *Respon Mohammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959*. (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati: Bandung)

c) Hartanto, H. 2005. *Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Politik Indonesia (1956-1965)*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang)

d) Yeni, F. 2021. *Kritik Majalah Panji Masyarakat terhadap Orde Lama masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)*. (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati: Bandung)

e) Rendi, F. 2021. *Buya Hamka dan Perannya dalam Dinamika Perpolitikan Republik Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Lama Tahun 1945-1966*. (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah: Metro)

f) Akhmad, A. & Novizal, W. (2024) Penafsiran, Ideologi, dan Afiliasi Politik: Kritik Buya Hamka (1908-1981 M) terhadap Nasakom Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966 M). *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 6 (2) DOI : <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/index>

2. Sumber Visual

a) Harian Kompas. (2019, November 9). *Kritik Keras Bung Hatta untuk Pemerintahan Soekarno* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6zVIRCmyH2Q>

b) Ahmad Nowmenta Putra. 2025. "KISAH 1965 BUNG HATTA - WAWANCARA EKSKLUSIF PROF. DR. MEUTIA HATTA". 9

Februari 2025. Youtube Video, 39.38.
<https://youtu.be/j5QJPhhzxPs?si=17IWTxu0s821S4bH>

3. Sumber Buku

- a) Noer, Deliar. 1990. *Mohammad Hatta : Biografi Politik*. LP3ES
- b) Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Pustaka. LP3ES
- c) Lev, D. (1966) *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. Cornell Modern Indonesia Project
- d) Herbert, G. (1934). *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. University of Chicago Press
- e) Feith, N. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Cornell University Press
- f) George, K. (1952) *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press
- g) Rusydi Hamka. (2016). *Pribadi dan Martabat Hamka*. Penerbit Noura
- h) Legge, John D. (1972), *Sukarno, A Political Biography atau Sukarno Sebuah Biografi Politik*, terjemahan Tim PSH. (1985), Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.

2. Kritik

Tahapan ini bertujuan untuk menilai, menguji, dan memverifikasi keaslian sumber yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kritik ekstern untuk menguji otentisitas sumber dan kritik intern untuk menilai kredibilitasnya. Kritik sumber dilakukan setelah data, baik tertulis maupun lisan, ditemukan. Kritik sumber terdiri dari:

a. Kritik Ekstern

Merupakan cara melakukan verifikasi sumber, apakah sumber tersebut merupakan asli atau tidak. Idealnya sumber yang digunakan bukan merupakan copyan namun data dan dokumen asli. Kritik Ekstern ini dilakukan guna melakukan analisis terhadap bahan yang membuat sumber tersebut di klasifikasikan menjadi sumber primer atau sumber sekunder.

- 1) Buku asli karya Mohammad Hatta berjudul *Demokrasi Kita* merupakan buku yang mudah ditemukan cetakan fisiknya maupun berupa e-book
- 2) Tulisan asli karya Hamka yaitu *Tafsir Al-Azhar, Dari Hati ke Hati dan Kenang-Kenangan Hidup*, juga merupakan tulisan yang bisa di dapatkan secara online maupun offline dengan kondisi yang baik.

b. Kritik Intern

Kritik intern digunakan untuk menilai kebenaran dan kredibilitas isi sumber, guna memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Setelah fakta atau kesaksian diuji melalui kritik ekstern, tahap selanjutnya adalah melakukan kritik intern sebagai pendalaman terhadap isi sumber.¹⁶

- 1) Buku *Demokrasi Kita* karya Muhammad Hatta yang diterbitkan pada tahun 1960 oleh Panji Masyarakat adalah karya yang membahas konsep dan penerapan demokrasi di Indonesia. Dalam buku ini, Hatta, menguraikan pandangannya tentang sistem demokrasi yang sesuai dengan kondisi sosial dan politik Indonesia.
- 2) Buku *Hati Nurani Melawan Kezaliman : Surat-Surat Bung Hatta Kepada Presiden Soekarno 1957-1965* yang disusun oleh Mochtar Lubis tahun 1988 merupakan kumpulan dari surat-surat Hatta kepada Soekarno yang berisi kritik, keresahan dan saran terhadap pemerintahan Soekarno.
- 3) Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran keagamaan, tetapi juga menyelipkan kritik-kritik sosial dan politik dalam karya-karyanya, termasuk kritik terhadap pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kritik Hamka terhadap Orde Lama terutama berkaitan dengan kebijakan politik yang dianggapnya menyimpang dari nilai-nilai Islam dan demokrasi.
- 4) Dalam buku *Kenang-Kenangan Hidup*, Hamka banyak menceritakan pengalaman hidupnya, termasuk bagaimana ia menghadapi tekanan

¹⁶ Sulasman. *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014) h. 104

politik di era Demokrasi Terpimpin. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah kritiknya terhadap pemerintahan Soekarno, terutama terkait kebijakan politik yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan demokrasi.

3. Interpretasi

Interpretasi dilakukan melalui dua tahapan utama. Pertama, analisis, yaitu menguraikan data yang telah dikritik karena satu sumber sering mengandung berbagai kemungkinan makna. Kedua, sintesis, yaitu menyatukan hasil analisis untuk membentuk kesimpulan yang utuh. Interpretasi sejarah sendiri merupakan proses penafsiran yang mencakup penguraian fakta-fakta, penilaian kepentingannya, serta relevansinya dengan masa kini. Dalam menyusun data tersebut, digunakan pendekatan serialisasi yang mencakup aspek kronologi, kausalitas, dan unsur imajinasi berdasarkan fakta yang ada.

Penelitian ini menggunakan teori *Challenge and Response* dari Arnold J. Toynbee sebagai pisau analisis utama untuk memahami dinamika kritik yang dilontarkan oleh Mohammad Hatta dan Hamka terhadap pemerintahan Soekarno selama periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966). Teori ini pertama kali dikembangkan dalam karya besar Toynbee berjudul *A Study of History*, yang terbit dalam 12 jilid antara tahun 1934 hingga 1961. Dalam karyanya, Toynbee menjelaskan bahwa peradaban manusia berkembang melalui proses dialektika antara tantangan (*challenge*) dan tanggapan (*response*). *Challenge* adalah segala bentuk tekanan, ujian, atau masalah yang muncul baik dari lingkungan alam maupun sosial-politik. *Response* adalah jawaban atau reaksi manusia (individu maupun kelompok) terhadap tantangan tersebut. Kemajuan atau kemunduran suatu peradaban atau kelompok masyarakat bergantung pada bagaimana mereka merespons tantangan yang muncul di hadapan mereka. Peradaban yang mampu bertahan dan berkembang adalah mereka yang bisa memberikan respons kreatif, etis, dan efektif terhadap tekanan atau krisis yang mereka hadapi.

Sebaliknya, kegagalan dalam memberikan respons yang tepat akan menyebabkan stagnasi, disintegrasi sosial, bahkan kehancuran peradaban itu sendiri.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk membaca pemusatan kekuasaan di tangan presiden, penghapusan sistem *check and balances*, pembubaran partai politik seperti Masyumi, pembredelan media, serta penguatan ideologi Nasakom menjadi bentuk-bentuk nyata dari tantangan (*challenge*) yang dihadapi masyarakat sipil, kaum intelektual, dan tokoh-tokoh reformis pada masa itu. Sementara posisi Hamka dan Mohammad Hatta sebagai representasi dari respons intelektual terhadap tantangan politik, ideologis, dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Soekarno membawa dampak serius terhadap struktur kekuasaan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan *Challenge and Response*, penelitian ini berupaya menempatkan kritik Hamka dan Hatta bukan sekadar sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan negara, tetapi sebagai respons bermakna dan konstruktif terhadap tantangan otoritarianisme dan distorsi demokrasi. Teori ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana masing-masing tokoh, dengan latar belakang dan pendekatan yang berbeda, menjawab krisis yang sama dengan cara yang mencerminkan posisi ideologis dan komitmen etis mereka. Kritik mereka menjadi bukti bahwa pemikiran dan moral publik dapat menjadi kekuatan melawan dominasi kekuasaan absolut, serta menjadi warisan penting dalam sejarah intelektual dan demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, penggunaan teori ini memberi kerangka yang tidak hanya mendeskriptifkan kritik, tetapi juga menjelaskan fungsi kritik itu sebagai daya respon terhadap krisis bangsa, memperkuat posisi penelitian ini dalam studi intelektualisme Islam dan demokrasi Indonesia.

¹⁷ Toynbee, Arnold J. *A Study of History*. Oxford University Press, 1934–1961

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap penyajian akhir dari fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan dan diinterpretasikan. Pada tahap ini, penulis menyusun sintesis hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan sebagai bentuk akhir dari proses penulisan sejarah. Pada tahap akhir ini, penulis merangkai fakta, data, dan temuan interpretatif dalam bentuk tulisan yang sistematis.

BAB I Pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Bab ini menjadi fondasi untuk pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II mengkaji kebijakan apa saja yang diberlakukan oleh Soekarno selama masa Demokrasi Terpimpin.

BAB III membahas bentuk dan isi kritik Mohammad Hatta dan Hamka terhadap kekuasaan Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin.

BAB IV menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis, sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

